

# Peran Pancasila dalam mewujudkan kepemimpinan berintegritas di Indonesia

Ahmad Rayhan Habiburrohman

Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [ahmadrayhan464@gmail.com](mailto:ahmadrayhan464@gmail.com)

## Kata Kunci:

Pancasila, kepemimpinan berintegritas, etika kepemimpinan, pendidikan karakter, dasar negara

## Keywords:

Pancasila, leadership with integrity, leadership ethics, character education, state philosophy

## ABSTRAK

Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter kepemimpinan yang berintegritas di Indonesia. Namun, maraknya kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan melemahnya etika publik menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pancasila dalam membangun kepemimpinan berintegritas serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat implementasinya. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah literatur akademik, regulasi nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa sila-sila Pancasila menawarkan

kerangka etik yang komprehensif untuk membentuk pemimpin yang jujur, adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik. Integritas kepemimpinan dapat diwujudkan melalui internalisasi nilai Ketuhanan, penghormatan terhadap martabat manusia, komitmen kolektif, prinsip musyawarah, dan keadilan sosial. Meski demikian, penerapannya menghadapi tantangan berupa budaya pragmatisme politik, lemahnya keteladanan, dan minimnya pendidikan karakter. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kepemimpinan berintegritas memerlukan revitalisasi pendidikan Pancasila, konsistensi penegakan hukum, serta sinergi antara lembaga negara dan institusi pendidikan. Dengan demikian, Pancasila tetap menjadi fondasi etis dan normatif bagi pembangunan kepemimpinan nasional yang bersih dan berintegritas.

## ABSTRACT

Pancasila, as the philosophical foundation of the Indonesian state, plays a vital role in shaping leaders with strong integrity. However, the persistence of corruption, abuse of power, and weakened public ethics indicates that the values of Pancasila have not been fully internalized within leadership practices. This study aims to analyze the role of Pancasila in fostering integrity-based leadership and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. The research employs a literature-based approach by reviewing academic sources, national regulations, and relevant scholarly works of lecturers. The findings reveal that the values of Pancasila offer a comprehensive ethical framework for cultivating leaders who are honest, fair, responsible, and committed to the public good. Integrity-based leadership can be realized through the internalization of divine values, respect for human dignity, collective commitment, deliberative principles, and social justice. Nevertheless, its implementation faces challenges such as political pragmatism, weak role modeling, and insufficient character education. This study concludes that strengthening leadership integrity requires revitalizing Pancasila education, ensuring consistent law enforcement, and promoting synergy between state institutions and educational bodies. Therefore, Pancasila remains an essential ethical and normative foundation for developing national leadership that is clean and integrity-driven.



## Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran fundamental dalam mengarahkan tujuan bernegara dan membentuk karakter masyarakat. Lima sila yang terkandung di dalamnya berfungsi bukan hanya sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai fondasi etis dalam penyelenggaraan kehidupan publik, termasuk dalam tatanan kepemimpinan nasional. Menurut Kaelan (2017), Pancasila merupakan sistem nilai yang harus diinternalisasikan ke seluruh aspek kehidupan berbangsa agar mampu menghasilkan perilaku sosial dan politik yang berkeadaban. Dalam konteks kepemimpinan, nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi sumber integritas, etika publik, serta tanggung jawab moral seorang pemimpin.

Namun, realitas sosial-politik Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dan praktik kepemimpinan. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya transparansi, dan merosotnya kepercayaan publik menjadi indikator bahwa nilai Pancasila belum terwujud secara konsisten dalam perilaku pemimpin bangsa (Haryatmoko, 2011). Bahkan, laporan (Transparency, 2010) menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Kondisi ini memperkuat urgensi untuk mengkaji kembali relevansi Pancasila sebagai pedoman etik dalam membangun kepemimpinan berintegritas di era modern.

Selain itu, perkembangan globalisasi, dinamika politik elektoral, dan perubahan budaya turut memberi tekanan terhadap kualitas integritas pemimpin. Menurut (Effendi, 2020), integritas kepemimpinan menjadi faktor kunci yang menentukan efektivitas pemerintahan dan kepercayaan publik. Masyarakat menuntut sosok pemimpin yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki karakter moral yang kuat, jujur, serta mampu menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa. Dalam konteks tersebut, Pancasila menawarkan kerangka etik yang komprehensif untuk membentuk pemimpin yang selaras dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pancasila dalam membentuk kepemimpinan berintegritas di Indonesia serta mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penting terhadap penguatan karakter kepemimpinan melalui revitalisasi pendidikan Pancasila, pembinaan moral, serta kebijakan kelembagaan yang konsisten dengan nilai-nilai dasar bangsa (Hambali & Muttaqin, 2025).

## Pembahasan

### Internalisasi Nilai Pancasila dalam Kepemimpinan Berintegritas

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan merupakan fondasi utama untuk mewujudkan pemimpin yang berkarakter, bertanggung jawab, serta memiliki integritas moral yang kuat. Nilai Ketuhanan, misalnya, mendorong pemimpin untuk berperilaku jujur, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan bertindak sesuai kode etik

jabatan. Menurut Kaelan (2017), nilai Ketuhanan dalam Pancasila tidak hanya bersifat religius, tetapi juga menjadi landasan moral bagi perilaku publik seorang pemimpin. Dengan demikian, pemimpin yang menempatkan dimensi ketuhanan sebagai prinsip etis akan lebih mampu menolak praktik-praktik koruptif.

Sila Kemanusiaan mengarahkan pemimpin agar menjunjung tinggi martabat manusia, bertindak adil, dan tidak melakukan diskriminasi. (Effendi, 2020) menegaskan bahwa kepemimpinan modern membutuhkan kemampuan empati, penghormatan terhadap hak-hak rakyat, serta orientasi pada pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan dalam Pancasila sangat relevan dalam membentuk pemimpin yang memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab sosial.

Sila Persatuan menuntut seorang pemimpin untuk menjaga stabilitas nasional, menghindari konflik kepentingan, dan mengedepankan persatuan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Integritas dalam konteks ini tercermin melalui kemampuan pemimpin untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Menurut (Silaban et al., 2025), sila ini memegang peran penting dalam memandu pemimpin menghadapi tantangan polarisasi dan konflik politik pada era modern.

### **Musyawarah sebagai Dasar Kepemimpinan Demokratis**

Sila keempat sebagai prinsip musyawarah mengandung nilai-nilai demokratis yang mendukung lahirnya pemimpin yang transparan dan akuntabel. Pemimpin berintegritas tidak hanya mengambil keputusan berdasarkan kepentingan elit politik, tetapi juga memperhatikan aspirasi masyarakat luas. Transparansi dan dialog publik menjadi bentuk aktualisasi nilai musyawarah yang sangat diperlukan dalam tata kelola pemerintahan modern.

Dalam kajian (Saragi et al., 2024), musyawarah dipahami sebagai instrumen etis yang mendorong terciptanya proses politik yang bersih dan bebas dari praktik manipulasi. Dengan demikian, sila keempat memberikan dasar moral bagi pemimpin untuk bertindak inklusif dan melibatkan publik dalam setiap kebijakan strategis.

### **Keadilan Sosial sebagai Tujuan Integritas Kepemimpinan**

Sila kelima, keadilan sosial, merupakan puncak dari nilai-nilai Pancasila yang sekaligus menjadi tolok ukur integritas seorang pemimpin. Keadilan sosial mencerminkan tanggung jawab pemimpin untuk memastikan pemerataan kesejahteraan, kesempatan yang setara, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. (Haryatmoko, 2011) menyatakan bahwa korupsi dan ketidakadilan struktural muncul ketika pemimpin gagal mengimplementasikan prinsip keadilan sosial secara konsisten. Artinya, integritas pemimpin dapat dinilai dari sejauh mana ia mampu mengatasi kesenjangan dan menciptakan kebijakan yang berkeadilan.

Dalam konteks pemerintahan Indonesia, keadilan sosial seringkali terhambat oleh budaya patronase politik, birokrasi yang tidak transparan, dan tumpang tindih kebijakan. Namun, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman normatif yang dapat menuntun pemimpin untuk memperjuangkan keadilan bagi seluruh warga negara.

### **Tantangan Implementasi Kepemimpinan Berbasis Pancasila**

Meskipun Pancasila telah menjadi dasar negara sejak awal kemerdekaan, pengimplementasiannya dalam kepemimpinan masih mengalami berbagai hambatan struktural maupun kultural. Tantangan tersebut meliputi budaya politik pragmatis, lemahnya keteladanan elit, serta rendahnya pendidikan karakter di berbagai lembaga pendidikan. (Transparency, 2010) mencatat bahwa tingkat persepsi korupsi Indonesia masih memprihatinkan, menandakan adanya persoalan serius pada integritas pemimpin di sektor publik.

Selain itu, globalisasi turut memengaruhi pola pikir generasi pemimpin muda. Nilai materialisme, kompetisi tidak sehat, serta orientasi kekuasaan seringkali menggeser nilai-nilai kebangsaan. Menurut penelitian (Hasba & Wildana, 2017) dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, arus globalisasi menuntut revitalisasi pendidikan Pancasila agar tetap relevan dalam membentuk karakter pemimpin bangsa.

### **Peran Pendidikan, Regulasi, dan Keteladanan**

Revitalisasi Pancasila dalam kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari peran pendidikan formal dan nonformal (Maimun, 2012). (Mujtahid, 2016) menjelaskan bahwa pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila harus diintegrasikan ke dalam kurikulum agar menghasilkan pemimpin yang cerdas secara intelektual dan matang secara moral. Selain pendidikan, konsistensi regulasi dan penegakan hukum juga berperan signifikan dalam membentuk kepemimpinan berintegritas.

Keteladanan pemimpin menjadi aspek yang tidak kalah penting. Pemimpin yang menunjukkan integritas dalam tindakan sehari-hari akan menjadi model yang efektif bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan (Setyorini et al., 2024) bahwa kepemimpinan yang bersandar pada nilai Pancasila memerlukan komitmen pribadi yang kuat dan kesadaran moral yang tinggi.

### **Peran Pancasila dalam Pembentukan Karakter Kepemimpinan Transformasional**

Kepemimpinan transformasional menekankan kemampuan pemimpin dalam memberikan inspirasi, motivasi, dan teladan moral kepada pengikutnya. Dalam konteks Indonesia, Pancasila menjadi sumber utama nilai yang dapat membentuk karakter kepemimpinan transformasional. Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan menjadi dasar bagi pemimpin untuk mempraktikkan empati, kejujuran, serta kepedulian terhadap kepentingan rakyat. Menurut Kaelan (2017), kepemimpinan transformasional hanya dapat terwujud apabila pemimpin memiliki integritas moral yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga kerangka etis yang mampu mendorong transformasi perilaku pemimpin.

### **Kepemimpinan Berintegritas sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia**

Integritas pemimpin merupakan faktor kunci dalam pencegahan korupsi. Pancasila memberikan arah moral yang kuat agar pemimpin menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. (Transparency, 2010) menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia masih menjadi masalah serius akibat rendahnya integritas pejabat publik. Ketika nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, dan ketuhanan tidak

diinternalisasikan dengan baik, maka peluang terjadinya korupsi semakin besar. (Gayatri, 2023) menegaskan bahwa kepemimpinan berbasis Pancasila dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat budaya antikorupsi melalui penegakan hukum, transparansi, dan pengelolaan birokrasi yang bersih.

### **Internalisasi Pancasila dalam Lembaga Pendidikan sebagai Basis Regenerasi Pemimpin**

Lembaga pendidikan berperan penting dalam memastikan nilai-nilai Pancasila tertanam pada generasi calon pemimpin bangsa. Universitas, sekolah, dan lembaga pembinaan karakter harus menerapkan pendidikan Pancasila tidak hanya sebatas teori, melainkan melalui praktik langsung seperti keteladanan, pembiasaan sikap, dan budaya akademik yang berintegritas. Menurut (Mujtahid, 2016), pendidikan karakter berbasis Pancasila adalah fondasi utama dalam membentuk kepemimpinan nasional yang tangguh menghadapi tantangan global. Lembaga pendidikan juga perlu mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan problem nyata bangsa, sehingga mahasiswa mampu mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan persoalan sosial dan politik kontemporer.

### **Pengaruh Globalisasi terhadap Pergeseran Nilai Kepemimpinan Pancasila**

Globalisasi membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik bangsa. Pengaruh budaya asing yang semakin mudah diakses bisa mempengaruhi pola pikir generasi pemimpin muda. (Hasba & Wildana, 2017) menemukan bahwa globalisasi dapat mengikis nilai Pancasila apabila tidak diimbangi dengan penguatan identitas nasional. Tantangan seperti budaya konsumtif, individualisme, dan materialisme dapat berlawanan dengan prinsip gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pemimpin masa kini harus mampu menyaring nilai-nilai global dengan menjadikan Pancasila sebagai filter moral dalam mengambil kebijakan dan tindakan.

### **Peran Keteladanan Pemimpin dalam Menghidupkan Nilai Pancasila**

Keteladanan merupakan instrumen penting dalam menghidupkan nilai Pancasila. Pemimpin yang menunjukkan perilaku berintegritas akan menciptakan budaya organisasi yang positif dan dipercaya masyarakat. Menurut (Setyorini et al., 2024), keteladanan moral pemimpin mampu menginspirasi pegawai dan masyarakat untuk mengadopsi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketika pemimpin bersikap transparan, jujur, dan adil, maka kepercayaan publik meningkat dan konflik sosial dapat diminimalisasi. Sebaliknya, ketika pemimpin bertindak tidak etis, maka citra negara dan kepercayaan masyarakat akan menurun drastis.

### **Kesimpulan dan Saran**

Pancasila memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk kepemimpinan berintegritas di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila memberikan dasar etis yang komprehensif bagi pemimpin dalam menjalankan tugasnya, mulai dari kejujuran, empati, persatuan, hingga keadilan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa integritas kepemimpinan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus bertumpu pada

internalisasi nilai Ketuhanan, penghormatan terhadap martabat manusia, penguatan komitmen kebangsaan, proses musyawarah yang demokratis, serta upaya mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan filosofis yang relevan dalam menghadapi dinamika politik, sosial, dan birokrasi modern.

Implementasi Pancasila dalam kepemimpinan masih menghadapi berbagai tantangan seperti pragmatisme politik, lemahnya keteladanan pemimpin, serta rendahnya konsistensi penegakan hukum. Arus globalisasi juga turut membawa perubahan nilai yang dapat menggeser prinsip-prinsip Pancasila apabila tidak diimbangi dengan penguatan pendidikan karakter. Oleh sebab itu, diperlukan revitalisasi nilai Pancasila melalui sistem pendidikan yang berkesinambungan, penegakan hukum yang tegas, serta pembentukan budaya birokrasi yang transparan dan akuntabel. Keteladanan moral dari para pemimpin pada berbagai tingkatan menjadi faktor kunci dalam memastikan Pancasila benar-benar menjadi dasar perilaku dan kebijakan publik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Pancasila tetap relevan sebagai pedoman integritas kepemimpinan di era kontemporer. Untuk mewujudkan kepemimpinan yang berintegritas, diperlukan kolaborasi antara pendidikan, regulasi, dan keteladanan moral agar nilai-nilai Pancasila dapat terimplementasi secara nyata dalam praktik pemerintahan dan kehidupan berbangsa.

## Daftar Pustaka

- Effendi, S. (2020). *Etika Kepemimpinan dan Pelayanan Publik di Era Modern*. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 22–34.
- Gayatri, M. (2023). *Kepemimpinan Pancasila dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 14369–14373.
- Hambali, M., & Muttaqin, M. I. (2025). *Falsafah kepemimpinan dan perilaku organisasi pendidikan Islam*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup. <https://repository.uin-malang.ac.id/23860/>
- Haryatmoko, J. (2011). *Etika publik untuk integritas pejabat publik dan politisi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hasba, I. B., & Wildana, D. T. (2017). *Patriarkhisme Pancasila: Dialektika Perempuan dalam Perumusan Pancasila dan Pembangunan Bangsa Indonesia*. <http://repository.uin-malang.ac.id/2106/>
- Maimun, A. (2012). *Menguatkan kembali eksistensi Pancasila di dunia pendidikan*. <https://repository.uin-malang.ac.id/6462/>
- Mujtahid, M. (2016). *Model Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Pendekatan Terintegrasi Dalam Perkuliahan Pada Jurusan PAI-FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. <http://repository.uin-malang.ac.id/1328/>
- Saragi, F. J., Manurung, R., & Fattah, M. (2024). *Pancasila sebagai Dasar Kepemimpinan: Analisis Kriteria Caleg dan Pejabat di Indonesia*. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 11(2), 46–50.
- Setyorini, I., Yahya, I., & Sukendar, S. (2024). *Revitalisasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Membangun Kepemimpinan Negara Pasca Reformasi*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 682–689.

Silaban, P. S. M. J., Tarigan, S. C. B., & Hutagalung, Y. O. (2025). *Pancasila Sebagai Sistem Etika: Menjaga Integritas Sosial dan Budaya dalam Kehidupan Berbangsa*. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 13 (5), 21–30.

Transparency, I. (2010). *Corruption Perceptions Index*. 2020. Transparency International Berlin.